

PEMBATASAN OPERASIONAL SELAMA RAMADAN

Pengusaha Hiburan Diimbau Taat Aturan

YOGYA (KR) - Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama bulan puasa Ramadan sejumlah kegiatan usaha hiburan dan rekreasi dilakukan pembatasan operasional. Pengusaha diimbau senantiasa taat aturan menyangkut kebijakan khusus tersebut.

Pembatasan operasional usaha hiburan selama Ramadan dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Walikota Yogya Nomor 100.3.4/914/SE/2024. Di dalamnya diatur mengenai jam buka dan tutup untuk usaha hiburan malam, panti pijat, arena permainan, dan jasa usaha makanan serta minuman. "Kami akan lakukan pantauan dan patroli terus menerus.

Tetapi sosialisasi juga kami lakukan. Ketika ada pelanggaran, tetap diberikan peringatan non yustisi," ungkap Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Sat Pol PP Kota Yogya Dodi Kurnianto, Senin (11/3).

Pemkot optimis pengusaha hiburan sudah memahami aturan dengan baik sehingga potensi pelanggaran juga

akan semakin kecil. Apalagi hal tersebut bukan kebijakan baru karena setiap tahun selama Ramadan pasti ada pembatasan. "Patroli juga akan kami lakukan di jalanan agar tidak ada kerumunan yang tidak jelas dalam rangka menjaga Ramadan agar berjalan lancar. Saya yakin semua sadar bahwa Ramadan ini situasi khusus yang harus kita jaga bersama," imbuh Dodi.

Sementara Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengaku SE yang diterbitkannya lebih ditujukan sebagai pengendalian agar semakin tertibnya kegiatan berusaha dan saling menghormati terhadap masyara-

kat yang menjalankan ibadah. "Pada prinsipnya Pemkot memberikan kesempatan untuk penyelenggaraan hiburan dan rekreasi jenis usaha hiburan malam untuk beroperasi. Hanya saja untuk jam operasionalnya kita atur," katanya.

Beberapa jenis usaha yang diatur antara lain usaha hiburan malam seperti club, diskotik, bar dan sejenisnya dapat dimulai pukul 21.00 hingga 24.00 WIB. Usaha karaoke di luar club malam, siang hari dapat buka pukul 09.00 hingga 12.00 WIB dan malam hari pukul 21.00 hingga 24.00 WIB. Sedangkan untuk usaha panti pijat seperti spa di dalam hotel bintang da-

pat menyesuaikan jam operasional usaha. Tetapi bagi spa di luar hotel diperbolehkan buka pukul 09.00 hingga 17.00 WIB dan pada malam harinya pukul 21.00 hingga 24.00 WIB.

Khusus untuk usaha arena permainan hanya bisa diselenggarakan pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. Begitu pula penyelenggaraan event bisa dilaksanakan setelah pukul 22.00 dan berakhir selambat-lambatnya pukul 01.00 WIB dini hari. "Bagi rumah makan dan restoran yang buka di siang hari imbauan kami agar tidak membuka secara terbuka. Bisa memanfaatkan tirai atau sejenisnya sebagai aling-aling," kata Singgih. **(Dhi)-d**

VALIDASI DTKS, SASAR 57.242 Jiwa

Optimis Target Penurunan Kemiskinan Tercapai

YOGYA (KR) - Merujuk dokumen rencana pembangunan daerah, angka kemiskinan di Kota Yogya pada tahun 2025 mendatang ditarget berkisar 6,07 hingga 6,61 persen. Target tersebut optimis mampu tercapai seiring serangkaian program yang bakal digulirkan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Agus Tri Haryanto, menjelaskan angka kemiskinan di Kota Yogya tahun 2023 juga menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada akhir Desember 2023 lalu tercatat 6,62 persen atau turun sebesar 0,13 persen dari tahun 2022. "Target angka kemiskinan tahun 2024 berada pada rentang 6,13 persen hingga 6,61 persen. Sedangkan di tahun 2025 antara 6,07 persen hingga 6,60 persen. Jika dilihat dari realisasi saat ini penurunan angka kemiskinan sampai tahun 2025 kami optimis bisa tercapai," terangnya, Jumat (8/3).

Menurutnya, untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran telah dilakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS tahun 2023 yang dirilis Kementerian Sosial. Hasilnya terdapat 57.242 jiwa atau 20.605 Kepala Keluarga (KK) yang memenuhi kriteria atau parameter miskin di Kota Yogya. Data tersebutlah yang akan menjadi acuan bersama dalam sasaran utama pengentasan kemiskinan di Kota Yogya.

Terkait upaya penanggulangan kemiskinan, Agus mengaku menjadi isu strategis pembangunan di Kota Yogya yang hingga saat ini program dan strateginya terus dioptimalisasikan. Salah satunya melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk menjangring aspirasi dari berbagai unsur masyarakat yang khusus mengangkat tema pengentasan kemiskinan.

Sementara Penjabat (Pj) Walikota

Yogya Singgih Raharjo, menyampaikan strategi penurunan kemiskinan tidak hanya melalui program pemberian bantuan untuk pengurangan beban pengeluaran maupun peningkatan keterampilan seperti pemberian pelatihan. Akan tetapi juga dilakukan dengan cara menciptakan iklim perekonomian yang kondusif dan inklusif yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok rentan. "Termasuk membuka peluang bagi kelompok rentan yaitu perempuan, anak, lansia, disabilitas dan masyarakat miskin untuk berusaha dan bersaing secara sehat agar bisa menaikkan pendapatan yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari garis kemiskinan," ujarnya.

Dirinya juga mengatakan penanggulangan kemiskinan merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Sehingga perlu melibatkan berbagai stakeholder dari semua unsur masyarakat mulai dari pemerintah kota, korporasi, komunitas, kampung dan kampus atau 5K yang sudah berjalan melalui Gandeng Gendong. "Pemkot melalui berbagai perangkat daerah bersinergi untuk menurunkan kemiskinan meliputi beberapa aspek di antaranya perlindungan sosial, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, infrastruktur dan permukiman, peningkatan pendapatan, ketahanan pangan dan penguatan informasi yang dalam pelaksanaannya juga berkolaborasi dengan unsur 5K," katanya.

Khusus berkaitan dengan infrastruktur dan permukiman, pengentasan kemiskinan juga berpijak pada keadilan tata ruang, hunian dan permukiman yang layak. Dengan demikian akses dasar permukiman mulai dari air bersih, sanitasi serta pengembangan kawasan juga menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan di Kota Yogya.

(Dhi)-d

Pasar Terban Dikembangkan Dukung PDIN



KR-Juvintarto

Talkshow Forum OPD Dinas Perindustrian Koperasi UKM.

YOGYA (KR) - Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) membawa manfaat besar untuk pengembangan potensi industri di Kota Yogya, khususnya UMK/IKM dan Koperasi. Nantinya akan diperkuat lagi dengan pembangunan Pasar Terban senilai Rp 48 Miliar yang terhubung dengan PDIN.

"Pasar Terban sebagai pusat jual beli unggas, khususnya ayam, juga terdapat pusat pemotongan ayam selain sayur mayur menjadi Pasar Modern saling mendukung dengan keberadaan PDIN," ungkap Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Ir Aman Yuridijaya MM, beberapa waktu lalu di PDIN, Jalan C Simanjuntak, Terban, Gondokusuman Kota Yogyakarta.

Sekda tampil sebagai narasumber dalam Talkshow Forum OPD Dinas Perindustrian Koperasi UKM yang didukung dan

dihadiri Kepala Dinkop UKM DIY Ir Srie Nurkyat-siwi MMA. Bersama narasumber lainnya Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta Drs Tri Karyadi Riyanto Raharjo SH MSi, Praktisi SDM Bio Hadikesuma, dan akademisi dari Departemen Ekonomi Bisnis Sekolah Vokasi UGM Dr Anggi Rahajeng MEc.

"Pemkot Yogya berkomitmen diantaranya melalui PDIN dan Pasar Terban sesuai tema Talkshow sebagai upaya Penguatan Koperasi UKM IKM melalui Sinergitas Pentahelix untuk Meningkatkan Daya Saing Kota Yogyakarta," tandas Aman.

Lebih lanjut Tri Karyadi menyebutkan Dinasperin-kopukm mendukung misi ke-3 dan ke-6 RPD Kota Yogya 2023-2026 yaitu mewujudkan daya saing Kota Yogya yang unggul dalam pelayanan dan jasa.

"Mewujudkan Kota Yogyakarta yang Good Governance (Tatakelola pemerintahan yang baik), clean government, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum," ujarnya.

Maka kebijakan Dinas-perinkopukm dengan meningkatkan pembinaan kelembagaan koperasi, meningkatkan pembinaan dan pengembangan koperasi, meningkatkan Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK, menumbuhkan Wirausaha Baru melalui Home Business Camp (HBC) dan Karang Mitra Usaha (KaMU).

"Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis. dan Manajemen bagi usaha mikro, meningkatkan pengembangan kemitraan UKM dengan hotel, restoran, toko dan mall. Meningkatkan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk IKM, meningkatkan kualitas produk IKM melalui fasilitasi standarisasi dan perizinan," jelasnya.

Sedang Dr Anggi Rahajeng menyarakan kolaborasi dukungan Perguruan Tinggi lintas sektoral mendukung upaya pengembangan Koperasi UKM IKM. Demikian juga Bio Hadikesuma menyatakan potensi UKM/UMKM di Yogya harus terus didorong dengan inovasi dan pendampingan. **(Vin)-d**

Perolehan Suara Partai Golkar Kota Yogya Naik Signifikan

YOGYA (KR) - Perolehan suara Partai Golkar Kota Yogyakarta pada Pemilu Legislatif 2024 naik 41,2 persen. Pada Pileg 2019 perolehan suara 17.080, sedangkan Pileg 2024 sebanyak 24.104 suara.

"Perolehan suara kita naik signifikan. Ini capaian sangat luar biasa," terang Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta Dr Agus Mulyono di sela acara penyerahan hasil kinerja Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Kota Yogya ke DPD Partai Golkar Kota Yogya di Kantor DPD Partai Golkar Kota Yogya, Jalan Argolubang Yogyakarta, Sabtu (9/3).

Menurut Agus Mulyono, peningkatan perolehan suara tersebut berdampak



KR-Devid Permana

Agus Mulyono (kanan) menerima berkas dari BSNPG Kota Yogya.

pada penambahan kursi Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Yogyakarta. Dari yang sebelumnya 4 kursi, sekarang bertambah satu menjadi 5 kursi. "Dapil 2 yang kemarin tidak punya kursi sekarang punya 1 kur-

si. Jadi di seluruh dapil di Kota Yogya (5 dapil), kita punya masing-masing 1 kursi," katanya.

Kemudian disinggung mengenai persiapan Pilkada Kota Yogyakarta, Agus Mulyono mengatakan pihaknya

TAK SEKADAR KEGIATAN SEREMONI

13 Maret Ditetapkan Sebagai Hari Jadi DIY

YOGYA (KR) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hari Jadi DIY, telah disetujui bersama oleh Penda DIY dan DPRD DIY. Berdasarkan keputusan tersebut 13 Maret 1755 ditetapkan sebagai Hari Jadi DIY. Dengan disetujuinya Raperda tersebut, DIY akan merayakan peringatan Hari Jadi Ke 269 pada 2024.

"Penetapan Hari Jadi DIY berkaitan dengan eksistensi sebagai daerah istimewa (keistimewaan) DIY. Konsekuensinya harus berdampak pada roda ekonomi masyarakatnya. Misal, diadakan pemertasan wayang, dampak ekonominya seperti apa. Tentu kita tidak ingin sekadar seremoni, yang setelah itu selesai," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono di Yogyakarta, Senin (11/3).

Beny mengatakan, penentuan tanggal

lahir DIY itu bertepatan dengan peristiwa bersejarah Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Peristiwa Hadeging Nagari sekaligus menandai berdirinya negara dan pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala komponennya meskipun belum mempunyai istana atau ibu kota kerajaan.

Penghageng II Tepas Purwoajilaksana Keraton Yogyakarta KRT Purwowinoto menjelaskan, penetapan tanggal hari jadi tersebut, awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 atau abad ke 18. Peristiwa yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta tersebut tidak otomatis dipilih sebagai hari lahir bagi DIY. Sebulan sete-

lahnya, 13 Maret 1755, Kamis Pon, 29 Jumadil Awal tahun Be 1680, Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I memproklamirkan Hadeging Nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di Pesanggrahan Garjitowati. Sampai akhirnya 13 Maret 1755 akhirnya menjadi Hari Jadi DIY.

"Sultan HB I mengumumkan secara resmi daerah kekuasaannya dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam kesempatan tersebut. Lokasinya di Hutan Beringan atau Pabringan yang terdapat sebuah umbul atau mata air Pacethokan dan Pesanggrahan Garjitowati. Pembangunan pasanggrahan tersebut diprakarsai Sunan Amangkurat IV kemudian diteruskan Sunan Pakubuwono II sampai rampung," paparnya. **(Ria)-d**

DPRD KOTA YOGYAKARTA

SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

BUTUH DUKUNGAN SARANA DAN SDM

Wujudkan Birokrasi Mudah dan Cepat

YOGYA (KR) - Apek pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak bisa lepas dari birokrasi. Masyarakat selaku penerima layanan pun selalu berharap agar terwujud birokrasi yang mudah dan cepat.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogya Triyono Hari Kuncoro, mengungkapkan di banyak tempat atau daerah kadang masih terjadi jarak antara keinginan masyarakat dengan apa yang dilakukan oleh birokrasi. "Masyarakat itu kan inginnya kalau butuh apa-apa bisa segera terlaksana. Membangun kesadaran bahwa birokrat itu adalah pelayan masyarakat harus terus ditumbuhkan. Di sisi lain masyarakat juga harus memahami hak dan kewajibannya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi agar haknya bisa diperoleh," tandasnya.

Oleh karena itu diperlukan dukungan baik dari aspek infrastruktur, fasilitas maupun sumber daya manusia (SDM). Komisi A selama ini juga memiliki mitra kerja yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan seperti Bagian Organisasi, kemantren, kelurahan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, maupun Badan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Anggota Komisi A dari Fraksi PKS ini pun berkomitmen untuk mendorong

Triyono Hari Kuncoro
Komisi A



KR-Istimewa

tumbuhnya birokrasi yang cepat, mudah bahkan murah. "Makanya misal ada usulan alat yang itu mendorong kinerja untuk kepentingan masyarakat maka akan langsung kita losokan. Fasilitas dan infrastruktur sepanjang untuk masyarakat, jelas kita dukung," imbuh Triyono Hari Kuncoro.

Sementara dari aspek SDM, dirinya selalu mendorong BKPSDM untuk intensif menggelar pelatihan-pelatihan yang temanya menyangkut service ex-

cellent. Terutama bagi SDM yang selama ini menjadi front office seperti di rumah sakit, perizinan dan lainnya. "Mereka ini kan seperti bagai wajah depannya pemerintah. Ketika layanan yang diberikannya itu bagus, maka yang dirasakan oleh masyarakat juga akan baik," jelasnya.

Hal yang tidak kalah penting juga ialah penempatan pegawai sesuai dengan kapasitas atau right man on the right place. Jika penempatan pegawai tidak sesuai profesionalitas maka justru akan menghambat birokrasi karena tidak bisa menjalankan pekerjaan semestinya. Sehingga layanan yang seharusnya bisa diberikan dengan cepat, justru akan sebaliknya.

Di samping itu, era digital yang sudah berkembang pada masa kini seharusnya juga menjadi daya dorong untuk percepatan birokrasi. Hal itu perlu juga didukung oleh SDM yang mumpuni seiring semua laporan sudah dilakukan melalui sistem. "Misal untuk layanan di wilayah, sekarang masih banyak pegawai yang sudah sepuh dan mungkin sulit untuk diupgrade. Sehingga perlu didorong ada perekrutan pegawai dari kalangan muda yang memahami betul IT. Memang, ada layanan yang sesuai SOP butuh waktu tidak cepat, tapi ada juga yang harus sat set sesuai peruntukannya," katanya. **(Dhi)-d**